

BPS: Ekonomi NTT Triwulan I 2026 Tumbuh 5,32 Persen Secara Tahunan

Kupang, nwartapedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan bahwa perekonomian NTT pada Triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,32 persen secara tahunan (year-on-year).

Dalam rilis resmi yang disampaikan pada Selasa (5/5/2026), BPS mencatat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT atas dasar harga berlaku mencapai Rp37,88 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp20,42 triliun.

BPS menjelaskan, pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 26,22 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan sebesar 19,92 persen.

Meski mencatat pertumbuhan tahunan yang positif, secara triwulanan (quarter-to-quarter) ekonomi NTT mengalami kontraksi sebesar 4,97 persen dibandingkan Triwulan IV 2025.

BPS mengungkapkan, kontraksi terdalam terjadi pada sektor konstruksi yang turun sebesar 19,34 persen.

Dari sisi pengeluaran, penurunan terbesar terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang terkontraksi hingga 45,29 persen, sejalan dengan pola realisasi belanja pemerintah di awal tahun anggaran.

Lebih lanjut, BPS menyebutkan struktur ekonomi NTT masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,34 persen.

Adapun dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama dengan kontribusi mencapai 64,43 persen.

BPS menilai, capaian ini menunjukkan ekonomi NTT tetap tumbuh secara tahunan meskipun menghadapi tekanan pada awal tahun 2026. *

Badan Pusat Statistik NTT Catat Kenaikan Signifikan Transportasi Udara dan Laut Maret 2026

Kupang, nwartapedia.com – Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan perkembangan positif pada sektor transportasi selama Maret 2026, ditandai dengan meningkatnya jumlah penerbangan, penumpang udara, serta aktivitas angkutan laut.

Jumlah penerbangan angkutan udara tercatat sebanyak 3.184 penerbangan, yang terdiri dari 1.593 keberangkatan dan 1.591 kedatangan.

Angka ini meningkat 25,45 persen dibandingkan Februari 2026 dan tumbuh 46,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontribusi terbesar terhadap aktivitas penerbangan berasal dari Bandara El Tari dengan porsi 36,87 persen, diikuti Bandara Komodo sebesar 23,93 persen.

Sejalan dengan itu, jumlah penumpang angkutan udara mencapai

223.302 orang, meningkat 38,10 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 33,40 persen secara tahunan.

Di sektor angkutan laut, jumlah pelayaran tercatat sebanyak 5.640 perjalanan, naik 25,72 persen dibandingkan Februari 2026 dan meningkat 16,67 persen dibandingkan Maret 2025.

Sementara itu, jumlah penumpang angkutan laut mencapai 431.469 orang, terdiri dari 213.048 penumpang turun dan 218.421 penumpang naik.

Secara bulanan angka ini meningkat 18,65 persen, meskipun secara tahunan mengalami penurunan sebesar 37,68 persen.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan peningkatan mobilitas masyarakat serta aktivitas transportasi di NTT, khususnya pada sektor udara yang menunjukkan pertumbuhan paling signifikan. *

Gubernur NTT Desak Kepala Daerah Percepat Kesiapan Sekolah Rakyat Rp250 Miliar

Kupang, [nwartapedia.com](https://www.nwartapedia.com) – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta seluruh kepala daerah segera menuntaskan persoalan lahan, perizinan, dan kesiapan teknis pembangunan Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan saat rapat bersama Sekjen Kementerian Sosial RI, Robben Rico, serta para bupati dan wali kota se-NTT di Kupang, Kamis (30/4/2026).

Melki menegaskan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran

Rp250 miliar untuk setiap sekolah, sehingga daerah diminta bergerak cepat memenuhi seluruh persyaratan administrasi.

Menurutnya, program Sekolah Rakyat menjadi peluang besar untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di NTT.

Sementara itu, Kemensos meminta seluruh daerah segera menyelesaikan dokumen lahan, KKPR, akses jalan, air bersih, dan listrik agar pembangunan dapat segera dimulai. *